

STATISTIK KEUANGAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019-2020



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

STATISTIK KEUANGAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019-2020



**STATISTIK KEUANGAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2019-2020**

ISSN : 2598-2664

Nomor Publikasi : 34000.2109

Katalog : 7203007.34

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman : xii + 76 halaman

Naskah :

BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Penyunting :

BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Gambar Kulit :

BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Diterbitkan oleh :

© BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dicetak oleh :

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Tim Penyusun

**STATISTIK KEUANGAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2019-2020**

Penanggung Jawab Teknis :
Sugeng Arianto, M.Si.

Editor :
1. Amirudin,S.Si, M.MSI.
2. Chatarina Budi Anggarini, S.ST, M.M.

Penulis :
Sudiyana, S.E, M.M.

Pengolah Data :
Sudiyana, S.E, M.M.

Desain/Layout :
Sudiyana, S.E, M.M.

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2019-2020 merupakan kelanjutan dari publikasi tahun sebelumnya yang secara teratur telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Publikasi ini menyajikan data mengenai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 dan APBD 2020 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan publikasi ini untuk memenuhi kebutuhan konsumen data, khususnya data mengenai keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ruang lingkup data, konsep, dan definisi yang digunakan dalam publikasi ini diterangkan dalam bab penjelasan umum, sedangkan realisasi APBD 2019 dan APBD 2020 se-Daerah Istimewa Yogyakarta, baik nominal maupun persentase dijelaskan pada bab ulasan singkat.

Demi perbaikan publikasi di masa mendatang, maka tanggapan dan saran-saran dari pengguna data sangat diharapkan. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga selesainya publikasi ini, diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, April 2021

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



Sugeng Arianto, M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
I. PENJELASAN UMUM	3
A. Pendahuluan	3
B. Ruang Lingkup	4
C. Konsep dan Definisi	4
II. ULASAN RINGKAS	11

Tabel-Tabel

1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2019	12
2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Persentasenya terhadap Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2019 ..	14
3. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2015-2019.....	15
4. Rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Persentasenya terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2020	16
5. Dasar Perimbangan Keuangan dan Bagian Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.....	17
6. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Persentasenya terhadap Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2019 ..	18
7. Persentase Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2015-2019..	19
8. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Persentasenya terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2020 ..	20
9. Jumlah dan Persentase Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2019.....	21

10. Persentase Belanja Tidak Langsung Terhadap Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2015- 2019.....	22
11. Rencana Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2020	23
12. Persentase Realisasi Belanja Menurut Fungsinya di Daerah Istimewa Yogyakarta 2019	24
13. Persentase Rencana Belanja Menurut Fungsinya di Daerah Istimewa Yogyakarta 2020	25

Lampiran Tabel

1.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2019	29
1.2. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2019	30
1.3. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2019	31
1.4. Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2019	32
1.5. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2020	33
1.6. Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2020	34
1.7. Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2020	35
1.8. Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2020	36
2.1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2019	37
2.2. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2019 (000 Rp)	38
2.3. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2019 (000 Rp)	39
2.4. Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2019.	40
2.5. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020	41
2.6. Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2020 ..	42
2.7. Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2020	43

2.8. Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2020.....	44
3.1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2019	45
3.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul 2019.....	46
3.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2019	47
3.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Bantul 2019	48
3.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2020	49
3.6 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul 2020	50
3.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2020	51
3.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Bantul 2020	52
4.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019	53
4.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2019	54
4.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2019	55
4.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2019.	56
4.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2020	57
4.6 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2020..	58
4.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2020	59
4.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2020	60
5.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman 2019	61
5.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman 2019.....	62
5.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman 2019	63
5.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Sleman 2019	64
5.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2020.....	65
5.6 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman 2020	66

5.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman 2020	67
5.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Sleman 2020.....	68
6.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta 2019	69
6.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta 2019	70
6.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta 2019	71
6.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kota Yogyakarta 2019	72
6.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta 2020	73
6.6 Rencana anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta 2020	74
6.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta 2020	75
6.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kota Yogyakarta 2020.....	76

Gambar- Gambar

1. Komposisi Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2019	15
2. Komposisi Realisasi Belanja Menurut Belanja Langsung dan Tidak Langsung di Daerah Istimewa Yogyakarta 2019	21

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 (Trilliun Rupiah)



I. PENJELASAN UMUM

A. Pendahuluan

Peranan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan wilayahnya terus diusahakan untuk lebih meningkatkan keselarasan dan kesinambungan dengan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab.

Pemerintah daerah terus berupaya untuk mendapatkan dan meningkatkan serta menggali sumber-sumber potensi daerah. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah pemerintah daerah melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu data statistik mengenai keuangan daerah menjadi semakin diperlukan dalam rangka keperluan kelengkapan informasi tentang keuangan negara, analisis dan pengambilan keputusan. Kegunaan data keuangan daerah antara lain :

1. Sebagai bahan dalam penyusunan neraca ekonomi secara makro seperti pendapatan regional, tabel input output, dan neraca arus dana.
2. Memberikan informasi tentang realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Untuk mengetahui potensi dan peranan sumber dana dari masing-masing daerah.
4. Sebagai informasi bagi pemerintah pusat, untuk menentukan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah.

B. Ruang Lingkup

Pengumpulan data statistik keuangan daerah dibedakan antara lain :

1. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi.

Data Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi bersumber dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Data Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dikumpulkan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Konsep dan Definisi

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan semua penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1) Pajak Daerah

Adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain.

2) Retribusi Daerah

Yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi dalam tiga bagian yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Contoh retribusi jasa umum antara lain pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, dan lain-lain. Contoh retribusi jasa usaha antara lain pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan atau pertokoan, penjualan produksi usaha daerah, dan lain-lain. Contoh retribusi perijinan tertentu antara lain izin mendirikan bangunan, izin trayek, dan lain-lain.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya serta bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, dan lain-lain.

b. Dana Perimbangan

Adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan ini terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

1) Bagi Hasil Pajak.

Bagi hasil pajak terdiri dari bagian penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh pasal 21 orang pribadi, dan lain-lain.

2) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam.

Pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam berasal dari pendapatan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

3) Dana Alokasi Umum.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

4) Dana Alokasi Khusus.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Adalah penerimaan dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Penerimaan lainnya terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta dana bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi equitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah terdiri dari:

a. Belanja Tak Langsung

Belanja tak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Kelompok belanja tak langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dan Belanja Tidak Terduga.

b. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan.

Belanja langsung meliputi :

- Belanja Pegawai.
- Belanja Barang dan Jasa.
- Belanja Modal.

ULASAN



https://yogyakarta.bps.go.id

II. ULASAN RINGKAS

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Pemberian wewenang ini diwujudkan dengan pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Prinsip dasar pemberian otonomi didasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar pertimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan akan lebih mampu memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa, dan peran aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal.

Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan dengan memenuhi azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pertambuan. Penyelenggaraan tugas-tugas desentralisasi semakin berkembang sejalan dengan tuntutan pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Agar daerah dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka perlu memiliki sumber pembiayaan yang cukup. Wujud otonomi daerah dengan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab menuntut pemerintah daerah agar dapat meningkatkan penerimaan dan mengoptimalkan pengeluaran.

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Selanjutnya, berkaitan dengan hakekat otonomi daerah yaitu yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat

dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data statistik keuangan daerah dapat memberikan gambaran perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran serta analisanya yang merupakan informasi penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan melihat kemampuan atau tingkat kemandirian daerah.

Pada Tabel.1 dapat dilihat realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019.

Tabel 1
Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah
di Daerah Istimewa Yogyakarta 2019

Pemerintah Daerah	Realisasi Pendapatan (Juta Rp.)	Realisasi Belanja (Juta Rp.)	Ratio Pendapatan terhadap Belanja	Surplus/Defisit (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
D.I.Yogyakarta	5.699.357	5.544.650	1,03	2,71
Kab. Kulon Progo	1.672.270	1.671.662	1,00	0,04
Kab. Bantul	2.269.539	2.283.585	0,99	-0,62
Kab. Gunungkidul	2.113.060	2.132.222	0,99	-0,91
Kab. Sleman	2.840.636	2.776.995	1,02	2,24
Kota Yogyakarta	1.765.760	1.734.593	1,02	1,77

Dari tabel tersebut dapat kita ketahui, bahwa rasio pendapatan/penerimaan daerah terhadap belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta mengalami surplus anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan yang diperoleh pada tahun 2019 sudah dapat mencukupi kebutuhan belanja daerah. Sedangkan Kabupaten Bantul, dan Gunungkidul mengalami defisit , masing-masing sebesar -0,62 persen dan -0,91persen.

Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta pada tahun 2019 memperoleh pendapatan/penerimaan sebesar 5,699 triliun rupiah dengan total pembelanjaan mencapai 5,544 triliun rupiah. Dengan demikian pada tahun 2019 Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta mengalami surplus keuangan sebesar 154,707 miliar rupiah atau 2,71 persen.

Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang memperoleh pendapatan/penerimaan keuangan terbesar diantara kabupaten/kota lainnya yaitu mencapai nilai 2,841 triliun rupiah. Dengan belanja sebesar 2,777 triliun rupiah Kabupaten Sleman mengalami surplus anggaran sebesar 64 miliar rupiah. Kabupaten Kulon Progo mempunyai pendapatan paling kecil yaitu sebesar 1,672 triliun, dengan surplus 0,04 persen atau sebesar 608 juta rupiah dari total belanja sebesar 1,671 triliun.

Salah satu syarat yang diperlukan (*necessary condition*) untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah sebagaimana uraian sebelumnya, adalah tersedianya sumber-sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan pemerintah daerah tersebut telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu disamping sumber pembiayaan dari pemerintah diatasnya berupa dana perimbangan, juga sumber pembiayaan dari dalam sendiri.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi, adalah daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dari pendapatan keuangan daerah. Pengelolaan PAD yang baik adalah pengelolaan PAD yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan, tanpa mengurangi alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber penerimaan daerah yang dimasukkan dalam pos Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Lain-lain PAD yang sah

Jenis-jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Berbeda dengan pemerintah provinsi, jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota yaitu :

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C
- Pajak Parkir

Besarnya persentase PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan besarnya sumbangan PAD daerah terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar persentase PAD terhadap total pendapatan maupun terhadap total belanja, menunjukkan bahwa daerah mampu untuk mencukupi belanja daerah sendiri. Sumbangan PAD terhadap total pendapatan ataupun terhadap total belanja tahun 2019, sebagai berikut:

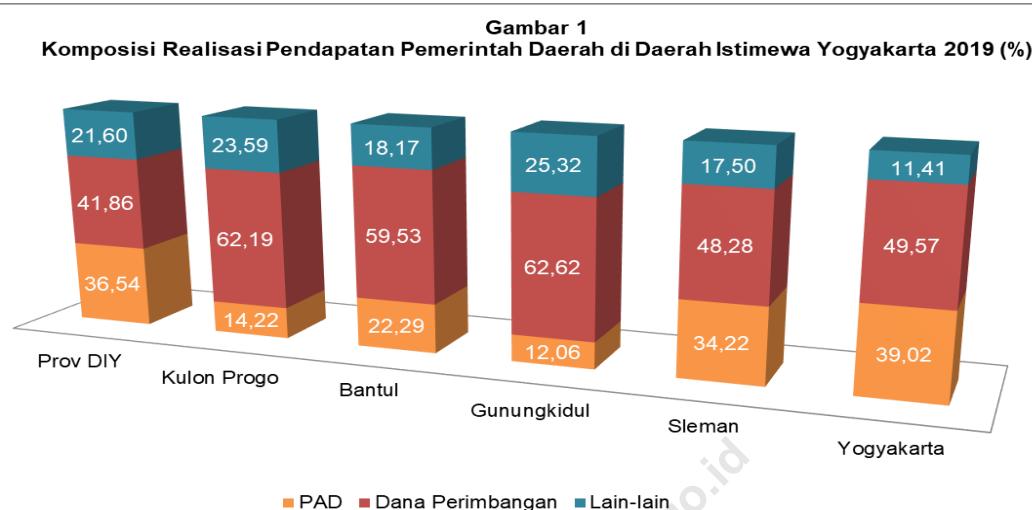
**Tabel 2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Persentasenya terhadap Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2019**

Pemerintah Daerah	Realisasi Pendapatan (Juta Rp.)	Realisasi Belanja (Juta Rp.)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Juta Rp.)	PAD thd Pendapatan (%)	PAD thd Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D.I. Yogyakarta	5.699.357	5.544.650	2.082.795	36,54	37,56
Kab. Kulon Progo	1.672.270	1.671.662	237.877	14,22	14,23
Kab. Bantul	2.269.539	2.283.585	505.929	22,29	22,16
Kab. Gunungkidul	2.113.060	2.132.222	254.811	12,06	11,95
Kab. Sleman	2.840.636	2.776.995	972.050	34,22	35,00
Kota Yogyakarta	1.765.760	1.734.593	689.050	39,02	39,72

Besaran sumbangan PAD terhadap pendapatan pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019 cukup bervariasi. Dari lima kabupaten/ kota di D.I.Yogyakarta, Kota Yogyakarta merupakan kabupaten/kota yang mempunyai persentase PAD terbesar, yaitu mencapai 39,02 persen dari realisasi pendapatannya, disusul kemudian oleh Kabupaten Sleman dengan 34,22 persen. Kabupaten/kota dengan persentase PAD terhadap pendapatan yang terendah adalah Kabupaten Gunungkidul,

yaitu 12,06 persen. Sementara itu persentase PAD Pemerintah Provinsi D.I.Yogyakarta cukup besar yaitu mencapai 36,54 persen terhadap realisasi pendapatannya.

Komposisi realisasi pendapatan untuk masing-masing pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota Tahun 2019 dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini.



Tabel 3
Percentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2015 – 2019

Pemerintah Daerah	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata	Perkembangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
D.I.Yogyakarta	46,86	42,93	36,42	37,50	36,54	40,05	-2,58
Kab. Kulon Progo	13,92	13,27	17,52	13,53	14,22	14,49	0,08
Kab. Bantul	20,02	20,22	23,68	20,77	22,29	21,40	0,57
Kab. Gunungkidul	12,26	12,47	14,69	12,28	12,06	12,75	-0,05
Kab. Sleman	28,03	30,79	31,57	32,97	34,22	31,52	1,55
Kota Yogyakarta	35,60	34,26	39,62	38,43	39,02	37,39	0,86

Dalam 5 tahun terakhir secara umum terdapat perubahan persentase PAD terhadap realisasi pendapatan di 5 kabupaten/kota. Rata-rata persentase PAD terhadap total pendapatan terbesar yaitu di Kota Yogyakarta sebesar 37,39 persen, dengan rata-rata perubahan sebesar 0,86 poin, sedangkan rata-rata persentase PAD terhadap realisasi pendapatan terkecil di Kabupaten Gunungkidul sebesar 12,75 persen, dengan rata-rata perubahan sebesar -0,05 poin. Sementara untuk Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta rata-rata persentase PAD terhadap realisasi pendapatan sebesar 40,05 persen, dengan rata-rata perubahan sebesar -2,58 poin.

Pada tabel 4 di bawah ini, dapat diketahui persentase besarnya rencana pendapatan asli daerah terhadap rencana pendapatan dan rencana belanja, hal ini dilakukan untuk memacu peningkatan pendapatan, dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Tabel 4
Rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Persentasenya terhadap
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah
di Daerah Istimewa Yogyakarta 2020

Pemerintah Daerah	Rencana Pendapatan (Juta Rp.)	Rencana Belanja (Juta Rp.)	Rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Juta Rp.)	PAD thd Rencana Pendapatan (%)	PAD thd Rencana Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D.I. Yogyakarta	6.130.178	6.494.711	2.163.743	35,30	33,32
Kab. Kulon Progo	1.770.882	1.766.778	247.920	14,00	14,03
Kab. Bantul	2.313.851	2.474.907	469.798	20,30	18,98
Kab. Gunungkidul	2.033.596	2.191.792	245.880	12,09	11,22
Kab. Sleman	2.852.717	2.992.880	944.482	33,11	31,56
Kota Yogyakarta	1.885.417	1.998.768	671.770	35,63	33,61

Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus diarahkan pada usaha yang terus menerus dan berkelanjutan agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga akan memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut, pada dasarnya dapat ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi pendapatan asli daerah adalah suatu tindakan atau usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti. Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru. Namun dalam rangka ekstensifikasi khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pokok nasional dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan investasi daerah.

Tabel 5
Dasar Perimbangan Keuangan dan Bagian Daerah menurut
Undang-undang nomor 33 Tahun 2004

Jenis Pungutan	Pemerintah (%)	Provinsi Bersangkutan (%)	Kabupaten /kota Penghasil (%)	Kabupaten /Kota Lain dan Provinsi Bersangkutan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PBB ¹⁾	10,0	16,2	64,8	0,0
2. BPHTB	20,0	16,0	64,0	0,0
3. PPh pasal 25, pasal 29 dan PPh pasal 21	80,0	8,0	12,0	0,0
4. Kehutanan				
a. IHPH/IHH	20,0	16,0	64,0	0,0
b. Provisi Sumber Daya Hutan	20,0	16,0	32,0	32,0
c. Reboisasi	60,0	0,0	40,0	0,0
5. Pertambangan Umum				
a. Land-Rent (Iuran Tetap)	20,0	16,0	64,0	0,0
b. Royalty iuran Eksplorasi	20,0	16,0	32,0	32,0
6. Perikanan ²⁾	20,0	0,0	0,0	0,0
7. Minyak Bumi	84,5	3,1	6,2	6,2
8. Gas Bumi	69,5	6,1	12,2	12,2
9. Panas Bumi	20,0	16,0	32,0	32,0

Catatan :

¹⁾ 9 % untuk biaya pemungutan

²⁾ 80% untuk seluruh kabupaten/kota

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber penerimaan daerah selain dari PAD juga berasal dari Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, serta Lain-lain Penerimaan yang Sah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan bukan pajak. Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Sedangkan dana bagi hasil bukan pajak bersumber dari sumber daya alam (kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi). Dasar perolehan dana perimbangan dapat dilihat pada tabel 5.

Sumber pendapatan lain yang sangat berperan sampai sekarang adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dua puluh enam persen (26%) dari penerimaan APBN (penerimaan dari minyak dan gas, penerimaan pajak serta penerimaan dari non-migas dan non-pajak) dialokasikan untuk DAU. Sepuluh persen (10%) DAU dibagi ke provinsi, dan sembilan puluh persen (90%) dibagi ke kabupaten/kota.

Alokasi DAU tergantung dari bobot (tolok ukur) daerah. Penentuan Tolok Ukur (Bobot) didasarkan pada kebutuhan wilayah otonomi daerah paling sedikit dapat dicerminkan dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografi, dan tingkat pendapatan masyarakat dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin, yang selanjutnya berkembang menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu juga didasarkan pada Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah terhadap daerah lain. Potensi ekonomi daerah yang antara lain dapat dicerminkan dari potensi penerimaan yang diterima daerah seperti potensi industri, sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga menjadi tolok ukur penentuan DAU.

Tabel 6
Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Persentasenya terhadap Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2019

Pemerintah Daerah	Realisasi Pendapatan (Juta Rp.)	Realisasi Belanja (Juta Rp.)	Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) (Juta Rp.)	DAU thd Pendapatan (%)	DAU thd Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D.I. Yogyakarta	5.699.357	5.544.650	1.351.102	23,71	24,37
Kab. Kulon Progo	1.672.270	1.671.662	732.089	43,78	43,79
Kab. Bantul	2.269.539	2.283.585	1.015.303	44,74	44,46
Kab. Gunungkidul	2.113.060	2.132.222	965.080	45,67	45,26
Kab. Sleman	2.840.636	2.776.995	1.035.862	36,47	37,30
Kota Yogyakarta	1.765.760	1.734.593	700.373	39,66	40,38

DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Pada dasarnya, dengan diberlakukannya otonomi daerah, diharapkan ketergantungan daerah pada pusat tentang keuangan daerah diharapkan semakin kecil.

Pada tahun 2019 besarnya DAU yang dialokasikan ke Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta sebesar 1,351 triliun rupiah atau mencapai 23,71 persen dari pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Besaran ini mampu mencukupi 24,37 persen dari belanja Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta.

Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi D.I.Yogyakarta yang memiliki persentase DAU terhadap realisasi pendapatannya terendah adalah Kabupaten Sleman dengan 36,47 persen, diikuti Kota Yogyakarta sebesar 39,66 persen. Sedangkan Kabupaten Gunungkidul memiliki persentase DAU terhadap realisasi pendapatannya tertinggi yaitu mencapai 45,67 persen.

Pada tabel 7 di bawah ini dapat dilihat besarnya persentase dana alokasi umum terhadap pendapatan pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta lima tahun terakhir yaitu dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019. Secara umum terjadi penurunan persentase besarnya dana alokasi umum terhadap pendapatan pemerintah daerah, hal ini menunjukkan adanya keberhasilan usaha pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungan keuangan dari pusat.

Tabel 7
Persentase Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah
di Daerah Istimewa Yogyakarta 2015 - 2019

Pemerintah Daerah	2015	2016	2017	2018	2019	Perkembangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
D.I. Yogyakarta	27,07	24,13	25,85	24,14	23,71	-5,10
Kab. Kulon Progo	53,55	52,91	49,53	45,25	43,78	-7,10
Kab. Bantul	48,32	49,98	47,07	44,09	44,74	-5,41
Kab. Gunungkidul	54,57	57,73	50,79	50,68	45,67	-7,07
Kab. Sleman	42,90	43,55	38,10	36,73	36,47	-5,88
Kota Yogyakarta	43,40	42,49	39,71	37,91	39,66	-3,35

Persentase dana alokasi umum (DAU) terhadap rencana anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se- Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 8. Dari tabel di bawah ini bahwa secara umum DAU juga semakin kecil dari total belanja yang direncanakan oleh pemerintah daerah.

Tabel 8
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Persentasenya terhadap
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah
di Daerah Istimewa Yogyakarta 2020

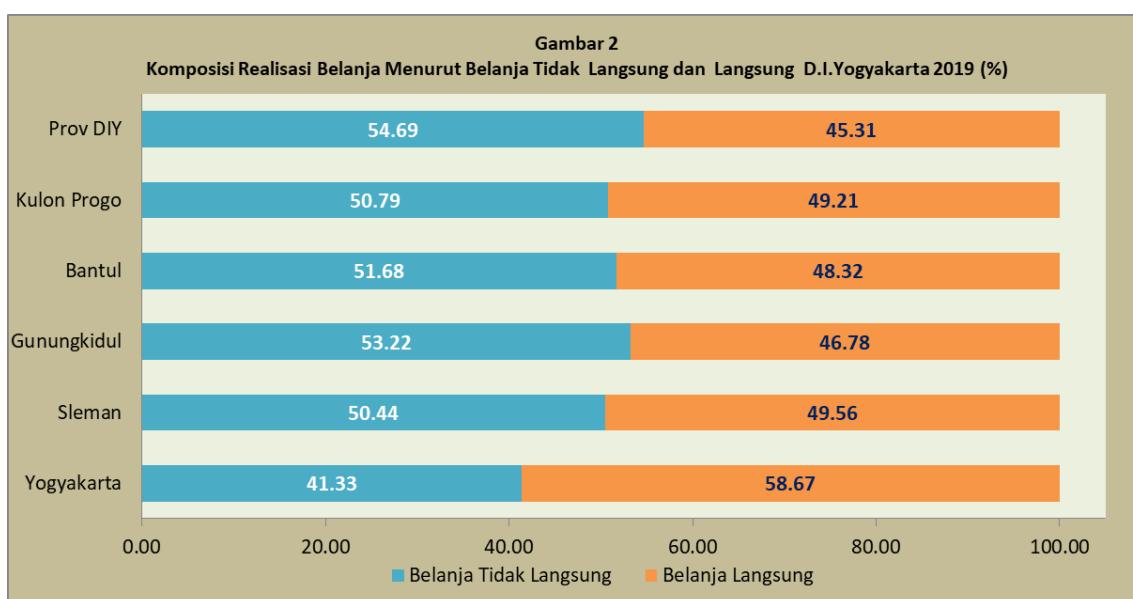
Pemerintah Daerah	Rencana Pendapatan (Juta Rp.)	Rencana Belanja (Juta Rp.)	Rencana Dana Alokasi Umum (DAU) (Juta Rp.)	DAU thd Rencana Pendapatan (%)	DAU thd Rencana Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D.I. Yogyakarta	6.130.178	6.494.711	1.359.607	22,18	20,93
Kab. Kulon Progo	1.770.882	1.766.778	737.498	41,65	41,74
Kab. Bantul	2.313.851	2.474.907	1.025.871	44,34	41,45
Kab. Gunungkidul	2.033.596	2.191.792	976.430	48,01	44,55
Kab. Sleman	2.852.717	2.992.880	1.046.068	36,67	34,95
Kota Yogyakarta	1.885.417	1.998.768	701.377	37,20	35,09

Belanja daerah dibedakan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Berpedoman pada prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota. Sesuai Peraturan Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Tabel 9
**Jumlah dan Persentase Realisasi Belanja Tidak Langsung dan
Belanja Langsung Pemerintah Daerah
di Daerah Istimewa Yogyakarta 2019**

Pemerintah Daerah	Belanja Tidak Langsung (Juta Rp.)	Persentase terhadap Total Belanja Daerah	Belanja Langsung (Juta Rp.)	Persentase terhadap Total Belanja Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
D.I.Yogyakarta	3.032.231	54,69	2.512.419	45,31
Kab. Kulon Progo	848.995	50,79	822.666	49,21
Kab. Bantul	1.180.251	51,68	1.103.334	48,32
Kab. Gunungkidul	1.134.779	53,22	997.443	46,78
Kab. Sleman	1.400.761	50,44	1.376.235	49,56
Kota Yogyakarta	716.970	41,33	1.017.624	58,67

Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta selama tahun 2019 menghabiskan dana 3,032 triliun rupiah (54,69 persen dari total belanja) untuk belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Secara umum persentase pos pembelanjaan daerah pemerintah kabupaten/kota di D.I.Yogyakarta masih digunakan untuk pos belanja tidak langsung, kecuali Kota Yogyakarta.



Kota Yogyakarta mempunyai proporsi belanja tidak langsung yang paling rendah diantara kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebesar 41,33 persen, diikuti Kabupaten Sleman sebesar 50,44 persen, dan diikuti Kabupaten Kulon Progo sebesar 50,79 persen. Sebaliknya daerah yang memiliki proporsi belanja tidak langsung terbesar adalah Kabupaten Gunungkidul dengan 53,22 persen terhadap realisasi belanja daerahnya. Sementara itu proporsi belanja tidak langsung untuk Pemerintah Provinsi D.I.Yogyakarta sebesar 54,69 persen.

Tabel 10
Persentase Belanja Tidak Langsung terhadap Realisasi Pendapatan
Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2015 – 2019

Pemerintah Daerah	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata	Perkembangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
D.I.Yogyakarta	53,26	51,26	50,48	48,59	53,20	51,36	-0,01
Kab. Kulon Progo	64,12	65,12	56,90	50,82	50,77	57,55	-3,34
Kab. Bantul	60,42	63,28	53,51	51,28	52,00	56,10	-2,10
Kab. Gunungkidul	66,40	68,83	58,45	58,19	53,70	61,11	-3,17
Kab. Sleman	56,60	59,29	49,69	47,58	49,31	51,90	-1,82
Kota Yogyakarta	50,49	49,72	35,62	40,25	40,60	43,34	-2,47

Pada Tahun 2019 rata-rata persentase belanja tidak langsung terhadap realisasi pendapatan secara umum mengalami penurunan. Penurunan tertinggi dalam lima tahun terakhir terjadi di Kabupaten Kulon Progo sebesar 3,34 poin, sedangkan penurunan terendah terjadi di Kabupaten Sleman sebesar 1,82 poin. Untuk Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta juga mengalami penurunan sebesar 0,01 poin.

Adapun persentase rencana belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap rencana belanja pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11
Rencana Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pemerintah Daerah
di Daerah Istimewa Yogyakarta 2020

Pemerintah Daerah	Rencana Belanja Tidak Langsung (Juta Rp.)	Persentase thd Total Rencana Belanja Daerah	Rencana Belanja Langsung (Juta Rp.)	Persentase thd Total Rencana Belanja Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
D.I.Yogyakarta	3.867.255	59,54	2.627.457	40,46
Kab. Kulon Progo	881.718	49,91	885.060	50,09
Kab. Bantul	1.334.475	53,92	1.140.432	46,08
Kab. Gunungkidul	1.198.758	54,69	993.035	45,31
Kab. Sleman	1.518.902	50,75	1.473.978	49,25
Kota Yogyakarta	796.667	39,86	1.202.102	60,14

Pada tabel 12 di bawah ini dapat dilihat bahwa realisasi belanja menurut fungsinya hampir semua Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagian besar mengalokasikan untuk anggaran sektor pendidikan yang bisa dilihat dari persentase belanja di sektor pendidikan yang paling tinggi dibanding sektor lainnya. Hal ini menunjukkan komitmen dari pemerintah daerah untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada penduduknya. Sektor yang memperoleh anggaran besar selanjutnya adalah sektor pelayanan umum, sektor kesehatan, dan sektor perumahan & fasilitas umum.

Berbeda dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, sektor kesehatan belum memperoleh porsi anggaran yang tinggi untuk Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa, hal ini dikarenakan pelayanan kesehatan terutama puskesmas masuk dalam anggaran pemerintah kabupaten/kota. Anggaran terbesar untuk Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibelanjakan untuk sektor pendidikan, lingkungan hidup, pariwisata dan budaya, perumahan dan fasilitas umum, dan pelayanan umum.

Tabel 12
Percentase Realisasi Belanja Menurut Fungsinya
di Daerah Istimewa Yogyakarta 2019

Fungsi Belanja	Provinsi DIY	Kab Kulon progo	Kab Bantul	Kab Gunung kidul	Kab Sleman	Kota Yogyakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pelayanan Umum	10,65	24,83	29,45	30,69	37,06	24,74
2. Ketertiban dan Keamanan	3,69	2,46	1,54	2,14	1,05	2,88
3. Ekonomi	6,85	4,80	6,80	3,85	5,28	10,80
4. Lingkungan Hidup	21,30	0,97	1,95	1,94	1,89	4,67
5. Perumahan dan Fasilitas Umum	12,62	11,57	8,24	6,60	11,58	11,58
6. Kesehatan	4,53	23,46	17,89	15,87	14,15	19,13
7. Pariwisata dan Budaya	15,79	1,77	1,40	4,17	1,22	2,20
8. Pendidikan	22,49	29,39	31,32	33,84	26,64	22,36
9. Perlindungan Sosial	2,09	0,75	1,42	0,89	1,13	1,65
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Rencana prioritas belanja pada tahun anggaran 2020 tidak banyak berubah dibanding realisasi belanja tahun 2019. Hal ini terlihat dari besarnya persentase masing-masing sektor belanja yang tidak jauh berbeda dibanding realisasi anggaran tahun sebelumnya. Pada rencana anggaran pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, sektor pendidikan, pelayanan umum, kesehatan dan sektor perumahan dan fasilitas umum masih mendapatkan porsi belanja yang lebih besar dibanding sektor lainnya.

Sedangkan pada Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta porsi belanja yang paling besar masih pada sektor pelayanan umum, diikuti sektor pendidikan dan lingkungan hidup. Persentase besarnya rencana belanja anggaran Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 13 di bawah ini.

Tabel 13
Persentase Rencana Belanja Menurut Fungsinya di Daerah Istimewa Yogyakarta
2020

Fungsi Belanja	Provinsi DIY	Kab Kulon progo	Kab Bantul	Kab Gunung kidul	Kab Sleman	Kota Yogyakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pelayanan Umum	50,63	24,65	14,14	29,07	35,07	24,92
2. Ketertiban dan Keamanan	0,95	1,03	3,70	3,01	1,00	2,62
3. Ekonomi	3,51	4,40	24,50	3,94	5,17	12,29
4. Lingkungan Hidup	8,85	2,21	1,51	2,07	2,08	3,20
5. Perumahan dan Fasilitas Umum	4,11	10,45	10,25	9,41	15,11	12,67
6. Kesehatan	2,65	21,60	17,00	15,49	14,65	18,97
7. Pariwisata dan Budaya	5,20	6,75	1,58	4,95	2,64	3,31
8. Pendidikan	22,33	27,99	26,47	31,17	23,26	20,45
9. Perlindungan Sosial	1,77	0,93	0,84	0,89	1,01	1,57
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Lampiran Tabel

Surat Edaran



<https://myayakarta.bps.go.id>

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2019 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah	5.699.357.232	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	2.082.795.336	36,54
1.2	Dana Perimbangan	2.385.702.912	41,86
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	1.230.858.985	21,60
II	Belanja Daerah	5.544.650.430	100,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	3.032.231.306	54,69
2.2	Belanja Langsung	2.512.419.124	45,31
Surplus		154.706.802	
Pembayaran Netto		265.861.156	

Tabel 1.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2019 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah	2.082.795.336	36,54
1.1	Pajak Daerah	1.773.940.606	31,13
1.2	Retribusi Daerah	42.420.050	0,74
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	85.960.823	1,51
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	180.473.857	3,17
II	Dana Perimbangan	2.385.702.912	41,86
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	56.060.582	0,98
2.2	Dana Alokasi Umum	1.351.102.020	23,71
2.3	Dana Alokasi Khusus	978.540.310	17,17
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	1.230.858.985	21,60
Jumlah Pendapatan Daerah		5.699.357.232	100,00

Tabel 1.3 Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2019 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Belanja Tidak Langsung	3.032.231.306	54,69
1.1	Belanja Pegawai	1.295.701.931	23,37
1.2	Belanja Bunga	0	0,00
1.3	Belanja Subsidi	76.067.609	1,37
1.4	Belanja Hibah	638.980.684	11,52
1.5	Belanja Bantuan Sosial	702.000	0,01
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	735.341.758	13,26
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	285.437.324	5,15
1.8	Belanja Tidak Terduga	0	0,00
II	Belanja Langsung	2.512.419.124	45,31
2.1	Belanja Pegawai	258.061.824	4,65
2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.219.154.114	21,99
2.3	Belanja Modal	1.035.203.186	18,67
Jumlah Belanja Daerah		5.544.650.430	100,00

Tabel 1.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2019 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	267.502.142	10,65
2	Ketertiban dan Keamanan	92.617.474	3,69
3	Ekonomi	172.000.060	6,85
4	Lingkungan Hidup	535.170.304	21,30
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	317.096.171	12,62
6	Kesehatan	113.746.961	4,53
7	Pariwisata dan Budaya	396.748.400	15,79
8	Pendidikan	565.045.138	22,49
9	Perlindungan Sosial	52.492.474	2,09
Jumlah Belanja Menurut Fungsi		2.512.419.124	100,00

Tabel 1.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2020 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah	6.130.178.110	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	2.163.742.926	35,30
1.2	Dana Perimbangan	2.573.597.467	41,98
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	1.392.837.717	22,72
II	Belanja Daerah	6.494.711.413	100,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	3.867.254.823	59,54
2.2	Belanja Langsung	2.627.456.590	40,46
Surplus		-364.533.303	
Pembayaran Netto		364.533.304	

Tabel 1.6 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2020 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah	2.163.742.926	35,30
1.1	Pajak Daerah	1.888.896.005	30,81
1.2	Retribusi Daerah	39.906.473	0,65
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	99.880.256	1,63
1.4	Lain –lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	135.060.192	2,20
II	Dana Perimbangan	2.573.597.467	41,98
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	86.659.336	1,41
2.2	Dana Alokasi Umum	1.359.606.514	22,18
2.3	Dana Alokasi Khusus	1.127.331.617	18,39
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	1.392.837.717	22,72
Jumlah Pendapatan Daerah		6.130.178.110	100,00

Tabel 1.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2020 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Belanja Tidak Langsung	3.867.254.823	59,54
1.1	Belanja Pegawai	1.709.790.268	26,33
1.2	Belanja Bunga	0	0
1.3	Belanja Subsidi	83.066.926	1,27899
1.4	Belanja Hibah	790.599.679	12,17
1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.492.000	0,04
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	769.906.468	11,85
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	496.550.178	7,65
1.8	Belanja Tidak Terduga	14.849.304	0,23
II	Belanja Langsung	2.627.456.590	40,46
2.1	Belanja Pegawai	103.907.107	1,60
2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.432.988.049	22,06
2.3	Belanja Modal	1.090.561.434	16,79
Jumlah Belanja Daerah		6.494.711.413	100,00

Tabel 1.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2020 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	3.288.025.369	50,63
2	Ketertiban dan Keamanan	61.668.730	0,95
3	Ekonomi	227.956.828	3,51
4	Lingkungan Hidup	574.743.686	8,85
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	267.091.377	4,11
6	Kesehatan	172.370.729	2,65
7	Pariwisata dan Budaya	337.978.981	5,20
8	Pendidikan	1.450.076.524	22,33
9	Perlindungan Sosial	114.798.189	1,77
Jumlah Belanja Menurut Fungsi		6.494.710.413	100,00

Tabel 2.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2019 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah	1.672.270.192	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	237.876.805	14,22
1.2	Dana Perimbangan	1.039.945.781	62,19
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	394.447.606	23,59
II	Belanja Daerah	1.671.661.811	100,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	848.995.358	50,79
2.2	Belanja Langsung	822.666.453	49,21
	Surplus	608.381	
	Pembayaran Netto	94.647.029	

Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2019 (000Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah	237.876.805	14,22
1.1	Pajak Daerah	64.577.519	3,86
1.2	Retribusi Daerah	9.232.109	0,55
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.543.796	0,87
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	149.523.381	8,94
II	Dana Perimbangan	1.039.945.781	62,19
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	13.999.609	0,84
2.2	Dana Alokasi Umum	732.088.720	43,78
2.3	Dana Alokasi Khusus	293.857.452	17,57
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	394.447.606	23,59
	Jumlah Pendapatan Daerah	1.672.270.192	76,41

Tabel 2.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2019 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Belanja Tidak Langsung	848.995.358	50,79
1.1	Belanja Pegawai	626.229.036	37,46
1.2	Belanja Bunga	286.820	0,02
1.3	Belanja Subsidi	0	0,00
1.4	Belanja Hibah	28.014.985	1,68
1.5	Belanja Bantuan Sosial	17.836.800	1,07
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	10.393.986	0,62
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	165.958.055	9,93
1.8	Belanja Tidak Terduga	275.676	0,02
II	Belanja Langsung	822.666.453	49,21
2.1	Belanja Pegawai	44.616.748	2,67
2.2	Belanja Barang dan Jasa	356.114.161	21,30
2.3	Belanja Modal	421.935.544	25,24
Jumlah Belanja Daerah		1.671.661.811	100,00

Tabel 2.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2019 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	415.130.198	24,83
2	Ketertiban dan Keamanan	41.124.737	2,46
3	Ekonomi	80.234.501	4,80
4	Lingkungan Hidup	16.296.803	0,97
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	193.390.364	11,57
6	Kesehatan	392.122.453	23,46
7	Pariwisata dan Budaya	29.527.591	1,77
8	Pendidikan	491.310.257	29,39
9	Perlindungan Sosial	12.524.907	0,75
Jumlah Belanja Menurut Fungsi		1.671.661.811	100,00

Tabel 2.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2020 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah	1.770.881.996	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	247.920.164	14,00
1.2	Dana Perimbangan	1.062.723.464	60,01
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	460.238.368	25,99
II	Belanja Daerah	1.766.777.593	100,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	881.717.913	49,91
2.2	Belanja Langsung	885.059.680	50,09
Surplus		4.104.403	
Pembayaran Netto		-4.104.403	

Tabel 2.6 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2020 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah	247.920.164	14,00
1.1	Pajak Daerah	75.488.927	4,26
1.2	Retribusi Daerah	10.576.578	0,60
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.719.773	0,89
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	146.134.886	8,25
II	Dana Perimbangan	1.062.723.464	60,01
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	19.225.276	1,09
2.2	Dana Alokasi Umum	737.498.209	41,65
2.3	Dana Alokasi Khusus	305.999.979	17,28
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	460.238.368	25,99
Jumlah Pendapatan Daerah		1.770.881.996	100,00

**Tabel 2.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2020
(000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Belanja Tidak Langsung	881.717.913	49,91
1.1	Belanja Pegawai	651.074.567	36,85
1.2	Belanja Bunga	93.496	0,01
1.3	Belanja Subsidi	0	0,00
1.4	Belanja Hibah	27.784.220	1,57
1.5	Belanja Bantuan Sosial	20.040.000	1,13
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	8.606.551	0,49
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	169.978.491	9,62
1.8	Belanja Tidak Terduga	4.140.588	0,23
II	Belanja Langsung	885.059.680	50,09
2.1	Belanja Pegawai	34.789.650	1,97
2.2	Belanja Barang dan Jasa	399.702.315	22,62
2.3	Belanja Modal	450.567.715	25,50
Jumlah Belanja Daerah		1.766.777.593	100,00

Tabel 2.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2020 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	435.490.867	24,65
2	Ketertiban dan Keamanan	18.129.942	1,03
3	Ekonomi	77.730.802	4,40
4	Lingkungan Hidup	39.109.327	2,21
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	184.570.377	10,45
6	Kesehatan	381.627.527	21,60
7	Pariwisata dan Budaya	119.198.037	6,75
8	Pendidikan	494.474.214	27,99
9	Perlindungan Sosial	16.446.500	0,93
Jumlah Belanja Menurut Fungsi		1.766.777.593	100,00

**Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2019
(000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah	2.269.539.168	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	505.929.473	22,29
1.2	Dana Perimbangan	1.351.157.101	59,53
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	412.452.594	18,17
II	Belanja Daerah	2.283.585.038	100,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.180.250.624	51,68
2.2	Belanja Langsung	1.103.334.414	48,32
Surplus		-14.045.870	
Pembayaran Netto		248.093.506	

Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul 2019 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah	505.929.472	22,29
1.1	Pajak Daerah	213.628.742	9,41
1.2	Retribusi Daerah	48.278.232	2,13
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.945.038	0,97
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli yang Sah	222.077.460	9,79
II	Dana Perimbangan	1.351.157.101	59,53
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	19.947.002	0,88
2.2	Dana Alokasi Umum	1.015.302.849	44,74
2.3	Dana Alokasi Khusus	315.907.250	13,92
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	412.452.595	18,17
Jumlah Pendapatan Daerah		2.269.539.169	100,00

Tabel 3.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2019 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Belanja Tidak Langsung	1.180.250.624	51,68
1.1	Belanja Pegawai	838.871.807	36,73
1.2	Belanja Bunga	39.333	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0	0,00
1.4	Belanja Hibah	59.645.561	2,61
1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.920.020	0,30
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	22.290.550	0,98
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	251.170.936	11,00
1.8	Belanja Tidak Terduga	1.312.417	0,06
II	Belanja Langsung	1.103.334.414	48,32
2.1	Belanja Pegawai	113.645.098	4,98
2.2	Belanja Barang dan Jasa	652.974.844	28,59
2.3	Belanja Modal	336.714.472	14,74
Jumlah Belanja Daerah		2.283.585.038	100,00

Tabel 3.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Bantul 2019 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	672.312.930	29,45
2	Ketertiban dan Keamanan	35.234.934	1,54
3	Ekonomi	155.536.980	6,80
4	Lingkungan Hidup	44.590.203	1,95
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	188.074.469	8,24
6	Kesehatan	408.431.165	17,89
7	Pariwisata dan Budaya	31.994.360	1,40
8	Pendidikan	715.069.335	31,32
9	Perlindungan Sosial	32.340.662	1,42
Jumlah Belanja Menurut Fungsi		2.283.585.038	100,00

Tabel 3.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2020 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah	2.313.851.073	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	469.798.331	20,30
1.2	Dana Perimbangan	1.393.629.941	60,23
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	450.422.801	19,47
II	Belanja Daerah	2.474.907.092	100,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.334.474.653	53,92
2.2	Belanja Langsung	1.140.432.439	46,08
Surplus		-161.056.019	
Pembayaran Netto		161.056.019	

Tabel 3.6 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul 2020 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah	469.798.331	20,30
1.1	Pajak Daerah	195.000.000	8,43
1.2	Retribusi Daerah	46.832.583	2,02
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.707.167	1,02
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	204.258.581	8,83
II	Dana Perimbangan	1.393.629.941	60,23
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	28.634.068	1,24
2.2	Dana Alokasi Umum	1.025.870.924	44,34
2.3	Dana Alokasi Khusus	339.124.949	14,66
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	450.422.801	19,47
Jumlah Pendapatan Daerah		2.313.851.073	100,00

Tabel 3.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2020 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Belanja Tidak Langsung	1.334.474.653	53,92
1.1	Belanja Pegawai	917.865.137	37,09
1.2	Belanja Bunga	0	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0	0,00
1.4	Belanja Hibah	90.916.212	3,67
1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.810.000	0,28
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	22.871.518	0,92
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	280.110.272	11,32
1.8	Belanja Tidak Terduga	15.901.515	0,64
II	Belanja Langsung	1.140.432.439	46,08
2.1	Belanja Pegawai	121.493.997	4,91
2.2	Belanja Barang dan Jasa	625.601.960	25,28
2.3	Belanja Modal	393.336.482	15,89
Jumlah Belanja Daerah		2.474.907.092	100,00

Tabel 3.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Bantul 2020 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	349.935.374	14,14
2	Ketertiban dan Keamanan	91.529.755	3,70
3	Ekonomi	606.384.792	24,50
4	Lingkungan Hidup	37.401.748	1,51
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	253.586.781	10,25
6	Kesehatan	420.809.026	17,00
7	Pariwisata dan Budaya	39.184.397	1,58
8	Pendidikan	655.136.749	26,47
9	Perlindungan Sosial	20.825.219	0,84
Jumlah Belanja Menurut Fungsi		2.474.793.842	100,00

Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2019 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah	2.113.060.425	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	254.810.945	12,06
1.2	Dana Perimbangan	1.323.197.557	62,62
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	535.051.923	25,32
II	Belanja Daerah	2.132.222.291	100,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.134.778.803	53,22
2.2	Belanja Langsung	997.443.488	46,78
	Surplus	-19.161.866	
	Pembayaran Netto	191.858.577	

Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2019 (000Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah	254.810.945	12,06
1.1	Pajak Daerah	57.963.265	2,74
1.2	Retribusi Daerah	35.553.531	1,68
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.068.841	0,71
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	146.225.308	6,92
II	Dana Perimbangan	1.323.197.557	62,62
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	15.569.904	0,74
2.2	Dana Alokasi Umum	965.080.463	45,67
2.3	Dana Alokasi Khusus	342.547.190	16,21
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	535.051.923	25,32
Jumlah Pendapatan Daerah		2.113.060.425	100,00

Tabel 4.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2019 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Belanja Tidak Langsung	1.134.778.803	53,22
1.1	Belanja Pegawai	836.964.213	39,25
1.2	Belanja Bunga	0	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0	0,00
1.4	Belanja Hibah	24.455.795	1,15
1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.050.000	0,05
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	11.009.664	0,52
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	260.200.882	12,20
1.8	Belanja Tidak Terduga	1.098.249	0,05
II	Belanja Langsung	997.443.488	46,78
2.1	Belanja Pegawai	43.894.014	2,06
2.2	Belanja Barang dan Jasa	459.764.785	21,56
2.3	Belanja Modal	493.784.689	23,16
Jumlah Belanja Daerah		2.132.222.291	100,00

Tabel 4.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2019 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	654.323.033	30,69
2	Ketertiban dan Keamanan	45.668.006	2,14
3	Ekonomi	82.185.522	3,85
4	Lingkungan Hidup	41.376.895	1,94
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	140.803.942	6,60
6	Kesehatan	338.409.607	15,87
7	Pariwisata dan Budaya	88.948.261	4,17
8	Pendidikan	721.528.543	33,84
9	Perlindungan Sosial	18.978.482	0,89
Jumlah Belanja Menurut Fungsi		2.132.222.291	100,00

Tabel 4.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2020 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah	2.033.595.610	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	245.880.406	12,09
1.2	Dana Perimbangan	1.376.965.341	67,71
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	410.749.863	20,20
II	Belanja Daerah	2.191.792.474	100,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.198.757.587	54,69
2.2	Belanja Langsung	993.034.887	45,31
	Surplus	-158.196.864	
	Pembiayaan Netto	158.196.864	

Tabel 4.6 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2020 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah	245.880.406	12,09
1.1	Pajak Daerah	58.923.350	2,90
1.2	Retribusi Daerah	29.643.297	1,46
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.044.465	0,79
1.4	Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	141.269.294	6,95
II	Dana Perimbangan	1.376.965.341	67,71
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	20.920.172	1,03
2.2	Dana Alokasi Umum	976.430.315	48,01
2.3	Dana Alokasi Khusus	379.614.854	18,67
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	410.749.863	20,20
Jumlah Pendapatan Daerah		2.033.595.610	100,00

**Tabel 4.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2020
(000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Belanja Tidak Langsung	1.198.757.587	54,69
1.1	Belanja Pegawai	854.992.363	39,01
1.2	Belanja Bunga	0	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0	0,00
1.4	Belanja Hibah	58.021.882	2,65
1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.637.000	0,12
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	11.766.755	0,54
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	267.339.587	12,20
1.8	Belanja Tidak Terduga	4.000.000	0,18
II	Belanja Langsung	993.034.887	45,31
2.1	Belanja Pegawai	49.200.708	2,24
2.2	Belanja Barang dan Jasa	493.622.640	22,52
2.3	Belanja Modal	450.211.539	20,54
Jumlah Belanja Daerah		2.191.792.474	100,00

Tabel 4.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2020 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	637.213.177	29,07
2	Ketertiban dan Keamanan	66.028.490	3,01
3	Ekonomi	86.343.539	3,94
4	Lingkungan Hidup	45.442.161	2,07
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	206.226.303	9,41
6	Kesehatan	339.461.561	15,49
7	Pariwisata dan Budaya	108.508.753	4,95
8	Pendidikan	683.154.572	31,17
9	Perlindungan Sosial	19.413.918	0,89
Jumlah Belanja Menurut Fungsi		2.191.792.474	100,00

**Tabel 5.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman 2019
(000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah	2.840.636.285	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	972.049.575	34,22
1.2	Dana Perimbangan	1.371.364.974	48,28
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	497.221.736	17,50
II	Belanja Daerah	2.776.995.369	100,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.400.760.682	50,44
2.2	Belanja Langsung	1.376.234.687	49,56
	Surplus	63.640.916	
	Pembayaran Netto	334.944.066	

Tabel 5.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman 2019 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah	972.049.575	34,22
1.1	Pajak Daerah	650.084.598	22,89
1.2	Retribusi Daerah	57.632.638	2,03
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	36.733.514	1,29
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	227.598.825	8,01
II	Dana Perimbangan	1.371.364.974	48,28
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	33.935.957	1,19
2.2	Dana Alokasi Umum	1.035.862.077	36,47
2.3	Dana Alokasi Khusus	301.566.940	10,62
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	497.221.736	17,50
Jumlah Pendapatan Daerah		2.840.636.285	100,00

Tabel 5.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman 2019 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Belanja Tidak Langsung	1.400.760.682	50,44
1.1	Belanja Pegawai	955.311.451	34,40
1.2	Belanja Bunga	815.138	0,03
1.3	Belanja Subsidi	0	0,00
1.4	Belanja Hibah	75.869.739	2,73
1.5	Belanja Bantuan Sosial	29.342.042	1,06
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	69.147.720	2,49
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	270.003.467	9,72
1.8	Belanja Tidak Terduga	271.125	0,01
II	Belanja Langsung	1.376.234.687	49,56
2.1	Belanja Pegawai	209.024.004	7,53
2.2	Belanja Barang dan Jasa	715.679.322	25,77
2.3	Belanja Modal	451.531.361	16,26
Jumlah Belanja Daerah		2.776.995.369	100,00

**Tabel 5.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Sleman 2019
(000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	1.029.392.663	37,06
2	Ketertiban dan Keamanan	29.031.215	1,05
3	Ekonomi	146.691.297	5,28
4	Lingkungan Hidup	52.452.970	1,89
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	321.497.062	11,58
6	Kesehatan	392.902.975	14,15
7	Pariwisata dan Budaya	33.937.998	1,22
8	Pendidikan	739.578.831	26,64
9	Perlindungan Sosial	31.510.358	1,13
Jumlah Belanja Menurut Fungsi		2.776.995.369	100,00

Tabel 5.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman 2020 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah	2.852.716.642	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	944.481.899	33,11
1.2	Dana Perimbangan	1.431.579.787	50,18
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	476.654.956	16,71
II	Belanja Daerah	2.992.880.040	100,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.518.902.216	50,75
2.2	Belanja Langsung	1.473.977.824	49,25
	Surplus	-140.163.398	
	Pembiayaan Netto	140.163.398	

**Tabel 5.6 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman 2020
(000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah	944.481.899	33,11
1.1	Pajak Daerah	641.100.000	22,47
1.2	Retribusi Daerah	46.311.898	1,62
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	48.665.318	1,71
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	208.404.683	7,31
II	Dana Perimbangan	1.431.579.787	50,18
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	46.383.504	1,63
2.2	Dana Alokasi Umum	1.046.068.391	36,67
2.3	Dana Alokasi Khusus	339.127.892	11,89
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	476.654.956	16,71
Jumlah Pendapatan Daerah		2.852.716.642	100,00

Tabel 5.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman 2020 (000Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Belanja Tidak Langsung	1.518.902.216	50,75
1.1	Belanja Pegawai	1.053.146.653	35,19
1.2	Belanja Bunga	140.676	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0	0,00
1.4	Belanja Hibah	100.021.156	3,34
1.5	Belanja Bantuan Sosial	28.630.250	0,96
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	69.626.769	2,33
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	262.864.433	8,78
1.8	Belanja Tidak Terduga	4.472.279	0,15
II	Belanja Langsung	1.473.977.824	49,25
2.1	Belanja Pegawai	225.191.131	7,52
2.2	Belanja Barang dan Jasa	745.296.445	24,90
2.3	Belanja Modal	503.490.248	16,82
Jumlah Belanja Daerah		2.992.880.040	100,00

Tabel 5.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Sleman 2020 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	1.049.676.482	35,07
2	Ketertiban dan Keamanan	29.987.996	1,00
3	Ekonomi	154.847.598	5,17
4	Lingkungan Hidup	62.185.547	2,08
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	452.155.230	15,11
6	Kesehatan	438.522.466	14,65
7	Pariwisata dan Budaya	79.132.156	2,64
8	Pendidikan	696.108.267	23,26
9	Perlindungan Sosial	30.264.298	1,01
Jumlah Belanja Menurut Fungsi		2.992.880.040	100,00

**Tabel 6.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta 2019
(000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah	1.765.760.418	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	689.049.726	39,02
1.2	Dana Perimbangan	875.308.178	49,57
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	201.402.515	11,41
II	Belanja Daerah	1.734.593.336	100,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	716.969.657	41,33
2.2	Belanja Langsung	1.017.623.679	58,67
Surplus		31.167.082	
Pembayaran Netto		189.173.050	

Tabel 6.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta 2019 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah	689.049.726	39,02
1.1	Pajak Daerah	451.265.948	25,56
1.2	Retribusi Daerah	32.428.344	1,84
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.975.004	1,64
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	176.380.430	9,99
II	Dana Perimbangan	875.308.178	49,57
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	28.975.322	1,64
2.2	Dana Alokasi Umum	700.372.564	39,66
2.3	Dana Alokasi Khusus	145.960.291	8,27
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	201.402.515	11,41
Jumlah Pendapatan Daerah		1.765.760.418	100,00

Tabel 6.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta 2019 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Belanja Tidak Langsung	716.969.657	41,33
1.1	Belanja Pegawai	623.730.246	35,96
1.2	Belanja Bunga	0	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0	0,00
1.4	Belanja Hibah	79.389.048	4,58
1.5	Belanja Bantuan Sosial	11.551.423	0,67
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	0	0,00
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	1.981.247	0,11
1.8	Belanja Tidak Terduga	317.693	0,02
II	Belanja Langsung	1.017.623.679	58,67
2.1	Belanja Pegawai	136.801.816	7,89
2.2	Belanja Barang dan Jasa	553.387.490	31,90
2.3	Belanja Modal	327.434.372	18,88
Jumlah Belanja Daerah		1.734.593.336	100,00

Tabel 6.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kota Yogyakarta 2019 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	429.083.072	24,74
2	Ketertiban dan Keamanan	50.001.403	2,88
3	Ekonomi	187.295.293	10,80
4	Lingkungan Hidup	81.003.634	4,67
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	200.801.838	11,58
6	Kesehatan	331.877.249	19,13
7	Pariwisata dan Budaya	38.098.331	2,20
8	Pendidikan	387.811.834	22,36
9	Perlindungan Sosial	28.620.682	1,65
Jumlah Belanja Menurut Fungsi		1.734.593.336	100,00

Tabel 6.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta 2020 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah	1.885.417.118	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	671.770.479	35,63
1.2	Dana Perimbangan	908.779.706	48,20
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	304.866.933	16,17
II	Belanja Daerah	1.998.768.134	100,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	796.666.565	39,86
2.2	Belanja Langsung	1.202.101.569	60,14
Surplus		-113.351.016	
Pembayaran Netto		113.351.016	

Tabel 6.6 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta 2020 (000Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah	671.770.479	35,63
1.1	Pajak Daerah	451.106.500	23,93
1.2	Retribusi Daerah	33.813.710	1,79
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	35.001.411	1,86
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	151.848.857	8,05
II	Dana Perimbangan	908.779.706	48,20
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	41.712.972	2,21
2.2	Dana Alokasi Umum	701.377.143	37,20
2.3	Dana Alokasi Khusus	165.689.591	8,79
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	304.866.933	16,17
Jumlah Pendapatan Daerah		1.885.417.118	100,00

Tabel 6.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta 2020 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Belanja Tidak Langsung	796.666.565	39,86
1.1	Belanja Pegawai	681.991.005	34,12
1.2	Belanja Bunga	0	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0	0,00
1.4	Belanja Hibah	62.515.172	3,13
1.5	Belanja Bantuan Sosial	47.341.295	2,37
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	0	0,00
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	1.319.092	0,07
1.8	Belanja Tidak Terduga	3.500.000	0,18
II	Belanja Langsung	1.202.101.569	60,14
2.1	Belanja Pegawai	138.163.801	6,91
2.2	Belanja Barang dan Jasa	723.991.264	36,22
2.3	Belanja Modal	339.946.504	17,01
Jumlah Belanja Daerah		1.998.768.134	100,00

Tabel 6.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kota Yogyakarta 2020 (000 Rp)

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	498.070.609	24,92
2	Ketertiban dan Keamanan	52.460.634	2,62
3	Ekonomi	245.745.756	12,29
4	Lingkungan Hidup	63.951.525	3,20
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	253.176.176	12,67
6	Kesehatan	379.239.855	18,97
7	Pariwisata dan Budaya	66.099.617	3,31
8	Pendidikan	408.695.642	20,45
9	Perlindungan Sosial	31.328.319	1,57
Jumlah Belanja Menurut Fungsi		1.998.768.134	100,00

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

http://yogyakarta.bps.go.id



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jl. Brawijaya Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul 55183

Telp. (0274) 4342234, Fax. (0274) 4342230

E-mail: bps3400@bps.go.id Homepage: <http://yogyakarta.bps.go.id>



978-602-139-246-1